

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Politik Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Palembang

Febi Febiola ^{1*}, Periansya ², Eka Jumarni Fithri ³

^{1*2,3} Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia.

Email: febifebiola73301@gmail.com ^{1*}, periansya@polsri.ac.id ², ekajf.2f@gmail.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 15 Desember 2024; Diterima dalam bentuk revisi 25 Desember 2024; Diterima 10 Januari 2025; Diterbitkan 1 Februari 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Febiola, F., Periansya, & Fithri, E. J. (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Politik Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(1), 239–253. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3570>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Politik Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Palembang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 OPD Kota Palembang dengan teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh . Kuesioner yang disebarluaskan kepada 128 pegawai di 32 OPD Kota Palembang dengan masing-masing 4 responden di tiap OPD. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Politik Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Uji secara simultan menunjukkan hasil bahwa variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Politik Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Nilai R Square sebesar 0,711, artinya Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Politik Anggaran adalah sebesar 71,10% terhadap Penyerapan Anggaran dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain..

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran; Perencanaan; Pelaksanaan; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Politik Anggaran.

Abstract

The research aims to determine the effect of budget planning, budget implementation, human resource competence and budget politics on budget absorption in Palembang City. The research method used in this research is quantitative method. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The population in this study were 32 OPDs of Palembang City with the sampling technique being saturated sampling. The questionnaires were distributed to 128 employees in 32 OPDs of Palembang City with 4 respondents each in each OPD. Based on the results of the study, it is known that Budget Planning, Budget Implementation and Budget Politics partially have a positive and significant effect on Budget Absorption, while Human Resource Competencies partially have no effect on Budget Absorption. Simultaneous tests show the results that the variables of Budget Planning, Budget Implementation, Human Resource Competencies, and Budget Politics together have an effect on Budget Absorption.

Keyword: Budget Absorption; Budget Politics; Human Resource Competencies; Implementation; Planning.

1. Pendahuluan

Anggaran berperan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2021), anggaran adalah panduan untuk tindakan pemerintah yang mencakup rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam satuan rupiah, yang disusun secara sistematis menurut klasifikasi tertentu untuk satu periode tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah cara pemerintah mengatur uang negara secara jelas dan bertanggung jawab untuk kebaikan rakyat. Pemerintah juga harus mengatur uang negara dengan baik agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Menurut Anfujatin (2016) penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai penilaian suatu pemerintah dalam mewujudkan program atau kebijakan dan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemerintahan yang telah direncanakan sebelumnya. Penyerapan anggaran adalah pencapaian sejauh mana anggaran dapat digunakan dari yang telah direncanakan atau dianggarkan. Menurut Roza (2022), penyerapan anggaran adalah seberapa efektif organisasi dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk program-program yang dilaksanakan. Semakin banyak kegiatan (program) yang dilaksanakan dalam satu periode waktu, maka akan semakin tinggi juga tingkat penyerapan anggaran yang direalisasikan oleh organisasi tersebut. Masalah utama yang sering terjadi adalah kurangnya penyerapan anggaran, dimana besaran anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan anggaran yang benar-benar digunakan. Hal ini bisa menyebabkan overhang anggaran, yaitu kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke pusat. Suwarni, (2017) dan Iqbal (2018) menyampaikan bahwa salah satu masalah yang selalu terjadi secara berulang dalam pengelolaan anggaran pemerintah adalah rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun dan peningkatan yang tiba-tiba menjelang akhir tahun. Hal ini menyebabkan penyerapan anggaran tidak merata, yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah dan memperlambat pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat terganggu. Pada pemerintah, dimana penyerapan anggaran yang terlalu rendah di awal tahun dan terlalu tinggi di akhir tahun dapat mengganggu jalannya proyek-proyek dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ratag, dkk. (2019) berpendapat bahwa perencanaan memainkan peran penting dalam pemanfaatan anggaran. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa tidak semua usulan anggaran akan disetujui sehingga sering kali terjadi pembengkakan permintaan anggaran melebihi kebutuhan sebenarnya. Akibatnya, anggaran yang disiapkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan dapat menimbulkan tantangan dalam kelancaran implementasi. Penting untuk merencanakan anggaran dengan cermat dan mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan manfaat yang tidak optimal dari anggaran yang dialokasikan dan menghambat pelaksanaan proyek. Mustafa dkk. (2022) penelitian menyatakan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan, karena perencanaan yang baik berkorelasi dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, penelitian Handayani (2022) dan Lestari (2022) menunjukkan pandangan yang berbeda, yaitu perencanaan anggaran tidak berdampak pada penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran adalah proses penggunaan anggaran yang telah disiapkan untuk kegiatan tertentu. Selain perencanaan anggaran, cara pelaksanaan anggaran juga mempengaruhi seberapa efektif anggaran tersebut digunakan. Menurut Kuswoyo (Oktaviani, 2020), penyerapan anggaran dipengaruhi oleh bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan anggaran dimulai setelah proses perencanaan anggaran selesai, atau jika dokumen pelaksanaan anggaran sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, maka anggaran tersebut dapat digunakan dengan lebih efektif. Selama proses pelaksanaan ini, sumber daya digunakan untuk menjalankan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan. Sebuah anggaran yang disusun dengan baik mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan benar jika pelaksanaannya kurang efisien. Sebaliknya, anggaran yang disusun dengan buruk juga mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan benar karena kurangnya perencanaan yang matang.

RESEARCH ARTICLE

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik agar anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Handayani, *dkk* (2020), Imelda, *dkk* (2022: 849), Sutono, *dkk* (2022) dan Harahap, *dkk* (2020) menunjukkan bahwa cara pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap seberapa efektif anggaran tersebut digunakan. Artinya, bagaimana suatu organisasi atau pemerintah mengelola dan menggunakan uang yang telah dialokasikan dalam anggaran akan mempengaruhi sejauh mana uang tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan yang telah ditentukan. Namun, terdapat perbedaan pandangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand, *dkk* (2020). Mereka menyimpulkan bahwa cara pelaksanaan anggaran sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap seberapa banyak uang dari anggaran yang benar-benar digunakan. Ini berarti bahwa meskipun ada rencana yang baik dalam pengelolaan anggaran, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu berdampak besar pada efektivitas penggunaan anggaran. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran selanjutnya adalah kompetensi sumber daya manusia. Organisasi, baik swasta maupun publik, membutuhkan SDM yang profesional dan berkualitas untuk menjalankan kegiatan mereka. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki karyawan yang ahli dalam bidangnya dan memiliki keterampilan yang baik, maka mereka dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Sebaliknya, jika karyawan tidak kompeten, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penyerapan anggaran perusahaan begitu juga dengan organisasi pemerintahan. Harahap *dkk* (2020) berpendapat bahwa kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menarik pendanaan dari lembaga pemerintah. Studi yang dilakukan Handayani *dkk* (2022), Mustafa *dkk* (2022) dan Sirin *dkk* (2020) menunjukkan bahwa kapabilitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil Imelda *dkk* (2022) yang menyatakan bahwa kapabilitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh politik anggaran sangat penting dalam proses penyerapan anggaran. Anggaran ini digunakan untuk menentukan prioritas dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Anggaran sebenarnya merupakan dokumen politik yang menunjukkan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif tentang bagaimana dana publik akan digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, anggaran mencerminkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan, serta jenis layanan apa yang harus diberikan kepada warga negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prioritas yang ditetapkan dalam anggaran tersebut adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Politik anggaran memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pemerintah memberikan layanan publik kepada warga negaranya (Ramadani *dkk*, 2019). Penelitian yang dilakukan Sanjaya (2018) dan Imelda, *dkk* (2022), menemukan hasil bahwa politik anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran. Namun hasil temuan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Handayani, *dkk* (2017) yang justru menyatakan bahwa politik anggaran tidak mempengaruhi alokasi atau penyerapan anggaran, sehingga terdapat inkonsistensi hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi politik anggaran.

Yulina (2021) berpendapat bahwa penyerapan anggaran dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik adalah masalah yang terkait dengan beberapa hal seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, dan loyalitas kinerja. Artinya, ada masalah dalam cara anggaran digunakan dan dihabiskan oleh pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk program-program publik. penyerapan anggaran merupakan hal yang penting dalam memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Fenomena ini menarik banyak peneliti dan ilmuwan untuk melakukan diskusi mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dalam konteks sektor publik. Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari sejauh mana realisasi realisasi rencana kerja dan realisasi anggaran yang dijadwalkan dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran. Fenomena penyerapan anggaran juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia baik kabupaten/kota maupun provinsi salah satunya yaitu Kota Palembang. Di Kota Palembang, tingkat penyerapan anggaran masih belum optimal, dikarenakan penyerapan anggaran di Kota Palembang pada tahun 2018-2022 masih di bawah 95%. Pada tahun 2018 sebesar 87,34%, tahun 2019 sebesar 82,80%, tahun 2020 sebesar 87,57%, tahun 2021 sebesar 82,85% dan tahun 2022 sebesar 89,61%. Menurut PMK

RESEARCH ARTICLE

Nomor 258/PMK.02/2015, sasaran penyerapan anggaran dikatakan baik apabila 95% anggaran yang diidentifikasi dapat terserap. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Syahwildan dan Damayanti (2022) dan persamaannya menggunakan beberapa variable yang digunakan, pada penelitian sebelumnya, yaitu variabel perencanaan, anggaran, pelaksanaan, anggaran dan variabel kompetensi sumber daya, manusia. Sedangkan perbedaannya yang pertama adalah menambahkan variabel independen politik anggaran sesuai rekomendasi penelitian Syahwildan & Damayanti (2022). Perbedaan kedua adalah objek penelitian, peneliti sebelumnya meneliti objek OPD pada Kabupaten Bekasi dengan jumlah 13 OPD, sedangkan penelitian ini meneliti objek OPD kota Palembang dengan jumlah 32 OPD. Pemilihan OPD tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa OPD tersebut merupakan pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas alokasi anggaran. Tingginya penyerapan anggaran mencerminkan capaian program serta kegiatan yang dideendasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Masih terdapat permasalahan pada tingkat penyerapan anggaran Kota Palembang yang masih berada di bawah target yaitu sekitar 90% dan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, politik anggaran dan penyerapan anggaran, karena masih terdapat inkonsistensi antara faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

Anggaran Menurut Grindle (1997), tujuan peningkatan kapasitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap. Peningkatan kapasitas, juga dikenal sebagai pengembangan kapasitas, melibatkan penerapan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Secara khusus, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya, memastikan bahwa upaya selaras dengan hasil yang diinginkan, dan menyinkronkan kebutuhan dan kemampuan untuk memberikan respons yang maksimal. Menurut Ilato (2017), pengembangan kapasitas pemerintahan daerah meliputi adaptasi, reformasi, dan penyesuaian kebijakan, peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja. Hal ini juga mencakup peningkatan keterampilan, serta kualifikasi pejabat pemerintah, daerah serta transformasi sistem nilai dan sikap, yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah daerah. Upaya-upaya ini memungkinkan pemerintah daerah menerapkan pemerintahan demokratis secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang Otonomi daerah, kapasitas pemerintahan daerah berarti memiliki kompetensi dan kemampuan yang berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi perannya sebagai lembaga pemerintahan dan secara efektif melayani kepentingan publik melalui penyediaan layanan publik (*public services*).

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran merupakan wujud tercapainya tujuan yang diinginkan (realisasi anggaran) dalam jangka waktu tertentu. Menurut Ferdinand dkk (2020), serapan anggaran merupakan realisasi anggaran pada suatu periode tertentu, sehingga dapat dilihat proporsi anggaran yang dibayarkan atau direalisasikan pada suatu tahun anggaran. Menurut Sanjaya (2018), penyerapan anggaran adalah langkah penting dalam proses pengelolaan anggaran. Proses ini merupakan salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran oleh DPR atau DPRD, penyerapan anggaran, pemantauan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Penyerapan anggaran adalah besarnya anggaran yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, yang besarnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyerapan anggaran adalah gambaran mengenai kemampuan atau keterampilan pemerintah dalam mengalokasikan atau merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dalam periode tertentu, sehingga dapat dilihat proporsi anggaran yang berhasil dilaksanakan atau dicairkan. Berdasarkan teori pengembangan kapasitas perencanaan yang baik dapat meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dalam mengelola dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran yang optimal. Penyerapan anggaran terutama dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, yang berfungsi sebagai kerangka penyusunan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Pada

RESEARCH ARTICLE

hakikatnya, perencanaan bertindak sebagai peta jalan selama proses penganggaran, yang memandu penyusunan rencana pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam periode yang ditentukan. Perencanaan yang tidak memadai dalam menentukan anggaran yang akan disajikan dapat berdampak buruk terhadap efisiensi program kegiatan kerja. Ketidakkonsistenan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kerja menjadi salah satu faktor penyebab terbatasnya kemampuan penyerapan anggaran. Menurut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hubi (2022) dan Arniwita, *dkk.* (2019), perencanaan anggaran memiliki dampak terhadap tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa, semakin baik perencanaan anggaran, semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2022) menyatakan sebaliknya, bahwa perencanaan anggaran tidak mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan, teori dan hasil penelitian tersebut, hipotesis pertama yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: H1: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran, merupakan implemetasi dari perencanaan, anggaran yang telah disusun (Ferdinan, *dkk*, 2020). Dalam perspektif pengembangan kapasitas, pelaksanaan anggaran yang berkualitas, seperti proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, pencairan dana yang tepat waktu serta monitoring dan evaluasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga mendorong peningkatan penyerapan anggaran. Anggaran yang dilaksanakan dengan baik dan efektif akan meningkatkan peluang tercapainya target penyerapan anggaran. Hal ini akan mempengaruhi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar sesuai dengan tujuan organisasi dan harapan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, *dkk* (2019) menemukan bahwa cara anggaran dijalankan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap seberapa banyak anggaran yang digunakan. Jadi, semakin baik cara anggaran dijalankan, semakin banyak anggaran yang digunakan. Temuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutono, *dkk* (2022), yang juga menunjukkan bahwa cara anggaran dijalankan memiliki pengaruh positif terhadap seberapa banyak anggaran yang digunakan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ferdinan, *dkk* (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu perencanaan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap seberapa banyak anggaran yang digunakan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, hipotesis kedua yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: H2: Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harahap, *dkk* (2020), disebutkan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi penggunaan anggaran di suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kemampuan dan keahlian dari karyawan yang bekerja di sana. Jadi, jika karyawan memiliki kemampuan dan keahlian yang baik, mereka dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi karena mereka berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen SDM harus dilakukan dengan baik agar karyawan dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasi. Dalam teori pengembangan kapasitas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dalam mengelola anggaran. Dengan peningkatan ini, diharapkan karyawan dapat lebih efisien dalam menggunakan anggaran, sehingga akhirnya dapat meningkatkan penggunaan anggaran secara keseluruhan. Pentingnya tingkat kompetensi dalam menentukan kinerja yang diharapkan dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kategori baik atau rata-rata. Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 54 Tahun 2021, kompetensi adalah, kemampuan, serta karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, kompetensi ini membantu PNS untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, efektif, dan efisien. Misalnya, jika seorang PNS bekerja di bidang keuangan, maka kompetensi yang dibutuhkan termasuk pengetahuan tentang peraturan keuangan, keterampilan dalam mengelola anggaran, dan sikap profesional dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan masyarakat. Jadi, kompetensi sangat penting dalam menentukan seberapa baik seorang PNS dapat menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi yang positif dalam pemerintahan daerah.

RESEARCH ARTICLE

Penelitian oleh Handayani, *dkk.* (2022) dan Mustafa, *dkk.* (2022) menunjukkan, bahwa, kompetensi sumber, daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan, anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia (SDM), semakin meningkat tingkat penyerapan anggaran. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Imelda, *dkk.* (2022) menemukan bahwa, kompetensi sumber daya, manusia tidak berpengaruh terhadap, penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, hipotesis ketiga yang dapat, dirumuskan dalam penelitian ini adalah: H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dalam teori pengembangan kapasitas menjelaskan bahwa efektivitas penyerapan anggaran tidak hanya bergantung pada alokasi sumber daya yang memadai, tetapi juga pada kapasitas organisasi untuk mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan. Politik anggaran memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat kapasitas organisasi dalam melaksanakan pembangunan melalui berbagai mekanisme yang ada. Anggaran digunakan untuk menentukan prioritas dan kebutuhan keuangan terkait prioritas tersebut. Menurut Majid (2019), dalam sektor publik merupakan alat politik yang digunakan untuk menunjukkan komitmen dari pemerintah dan kesepakatan dari lembaga legislatif terkait penggunaan dana publik untuk tujuan tertentu. Jadi, anggaran ini sebenarnya adalah cara untuk menunjukkan prioritas dan kepentingan pemerintah dalam memanfaatkan uang dari masyarakat. Selain itu, politik anggaran juga mencerminkan proses pengalokasian dana berdasarkan keinginan dan proses politik, baik oleh individu maupun kelompok. Artinya, keputusan terkait penggunaan dana publik tidak hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu. Hasil penelitian oleh Sanjaya (2018) dan Imelda, *dkk.* (2022) menemukan adanya, hubungan positif, dan signifikan antara politik anggaran dengan penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian oleh Ramadhani, *dkk.* (2019) yang menunjukkan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: H4: Politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan, metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan, pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditentukan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, peneliti menyebarluaskan kuesioner yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, politik anggaran, dan penyerapan anggaran.

2.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2020), populasi adalah wilayah generalisasi yang berisi objek atau subjek yang memiliki jumlah atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi, dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah 32 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Palembang. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus), yang artinya seluruh populasi OPD dijadikan sampel. Jadi, peneliti akan mempelajari dan mengambil kesimpulan dari seluruh 32 OPD yang ada di Kota Palembang.

2.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono, (2020), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menggunakan angket terstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup yang diberikan kepada 32 OPD di Kota Palembang. Setiap OPD menerima empat kuesioner, sehingga total kuesioner yang disebarluaskan adalah 128. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat mendapatkan informasi langsung dari responden tanpa melalui pihak lain. Angket terstruktur digunakan agar setiap responden menjawab

RESEARCH ARTICLE

pertanyaan yang sama, sehingga data yang diperoleh dapat dibandingkan secara lebih mudah dan akurat. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini.

2.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah mengumpulkan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya (Sugiyono, 2020). Data yang terkumpul diolah menggunakan aplikasi Statistical, Product and Service, Solutions (SPSS) versi 26. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi berganda, diikuti dengan uji statistik deskriptif, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi. Berikut merupakan rumus dalam model regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penyerapan, Anggaran

α = Konstanta,

X1 = Perencanaan, Anggaran,

X2 = Pelaksanaan Anggaran

X3 = Kompetensi, Sumber Daya, Manusia

X4 = Politik, Anggaran

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi

e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga, dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	124	15	25	22,50	1,990
Pelaksanaan Anggaran,	124	24	40	34,51	2,646
Kompetensi Sumber, Daya Manusia	124	21	37	30,81	3,255
Politik Anggaran,	124	12	23	17,39	2,140
Penyerapan Anggaran,	124	23	33	29,79	1,674
Valid N, (listwise)	124				

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang ditampilkan dalam tabel 1, diketahui bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, dan rata-rata (mean) sebesar 22,50 dengan standar deviasi 1,990. Variabel pelaksanaan anggaran menunjukkan nilai, minimum 24, nilai, maksimum 40, dengan rata-rata (mean) sebesar 34,51 dan standar deviasinya 2,646. Variabel kompetensi sumber, daya manusia memiliki nilai, minimum 21, nilai, maksimum 37, serta rata-rata (mean) 30,81 dengan standar deviasi 3,255. Variabel politik anggaran memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 23, dan rata-rata (mean) sebesar 17,39 dengan standar deviasinya 2,140. Sedangkan, variabel penyerapan anggaran memiliki nilai minimum 23, nilai maksimum 33, dengan rata-rata (mean) 29,79 dan standar deviasinya 1,647.

RESEARCH ARTICLE

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,99440929
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,057
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061 ^c

Hasil tabel di atas, disebutkan bahwa hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau nilai signifikansi dari data residual dalam penelitian ini adalah 0,061, yang lebih besar dari 0,05. Artinya, data residual tersebut terdistribusi secara normal, sehingga data yang ada dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam uji statistik, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal agar hasil analisisnya bisa dipercaya. Dengan nilai probabilitas di atas 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik lebih lanjut.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Perencanaan Anggaran	,729	1,371	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pelaksanaan Anggaran	,679	1,472	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,543	1,842	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Politik Anggaran	,547	1,829	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 3, kita dapat melihat bahwa nilai Tolerance dari setiap variabel adalah sebagai berikut: variabel perencanaan anggaran sebesar 0,729; variabel pelaksanaan anggaran 0,679; kompetensi sumber daya manusia 0,543; dan politik anggaran sebesar 0,547. Nilai-nilai tolerance ini semuanya lebih besar dari 0,10, dan nilai Variance, Inflation, Factor (VIF) dari keempat variabel tersebut juga kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan. Artinya, tidak ada korelasi antara variabel-variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berhubungan atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh dapat diandalkan dan akurat. Jadi, secara singkat, kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya.

RESEARCH ARTICLE

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Sig.	Keterangan
(Constant)	,270	
Perencanaan Anggaran	,382	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pelaksanaan Anggaran	,647	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,296	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Politik Anggaran	,593	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4, hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser, menunjukkan bahwa, tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi, variabel dependen nilai Absolut Residual (ABS_RES). Artinya, tidak ada faktor-faktor tertentu yang berpengaruh signifikan terhadap nilai ABS_RES. Hasil probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 0,05 menunjukkan bahwa, tidak ada, masalah heteroskedastisitas, pada model, regresi yang digunakan. Jadi, kesimpulannya adalah model regresi tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

3.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14,872	1,405		10,588	,000
	Perencanaan Anggaran	,136	,055	,162	2,487	,014
	Pelaksanaan Anggaran	,438	,043	,693	10,300	,000
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	-,235	,035	-,438	-6,619	,000
	Politik Anggaran	,230	,069	,229	3,345	,001

Berdasarkan tabel 5, diperoleh hasil, analisis regresi linear, berganda yang dilakukan atas pengolahan data melalui SPSS, dan berikut merupakan persamaan analisis regresi linear berganda:

$$Y = 14,872 + 0,136 + 0,438 - 0,235 + 0,230 + e$$

Nilai konstanta sebesar 14,872 menunjukkan bahwa jika variabel independen seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan politik anggaran bernilai 0, maka penyerapan anggaran akan tetap berada pada angka 14,872. Koefisien regresi untuk variabel perencanaan anggaran sebesar 0,136 mengindikasikan adanya hubungan positif dengan penyerapan anggaran, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit dalam perencanaan anggaran akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,136. Selain itu, koefisien regresi variabel pelaksanaan anggaran sebesar 0,438 juga menunjukkan hubungan positif, di mana peningkatan pelaksanaan anggaran akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,438. Di sisi lain, koefisien regresi untuk kompetensi sumber daya manusia adalah -0,235, yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif; peningkatan dalam kompetensi SDM justru akan mengurangi penyerapan anggaran sebesar 0,235. Terakhir, koefisien regresi untuk variabel politik anggaran sebesar 0,230 menunjukkan hubungan positif, di mana peningkatan dalam politik anggaran akan menyebabkan peningkatan penyerapan anggaran sebesar 0,230.

RESEARCH ARTICLE

3.1.4 Uji Hipotesis**1) Uji Parsial t**

Pengujian ini dilakukan, dengan tujuan untuk menilai apakah variabel independen penelitian ini mempunyai pengaruh, secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t berdasarkan Tabel 5 disajikan dibawah ini. Hipotesis pertama penelitian ini adalah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai t hitung variabel penganggaran sebesar 2,487 yang berarti lebih besar dari nilai t tabel 1,658 dan lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat signifikansi 0,014. Oleh karena itu, H1 menjadi: Diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada OPD Pemerintah Kota Palembang. Hipotesis kedua penelitian ini adalah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai t-hitung variabel pelaksanaan anggaran sebesar 10,300 lebih besar dari nilai t tabel 1,658 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran OPD di Kota Palembang. Hipotesis ketiga penelitian ini adalah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai t-hitung variabel kompetensi SDM sebesar -6,619 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,658 dan tingkat signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,000 dan kurang dari 0,05, yang menghasilkan H3 Ditolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM yang fluktuatif tidak mempengaruhi secara parsial atau signifikan terhadap penyerapan anggaran OPD di Kota Palembang. Hipotesis keempat penelitian ini adalah politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai t hitung pada variabel Politik Anggaran sebesar 3,345 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,658 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 maka hipotesis ke empat diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan fiskal secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kota Palembang.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua faktor yang tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya secara bersama-sama berpengaruh pada hasil akhir dari suatu penelitian. Penelitian yang baik biasanya memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat diandalkan dan tidak terjadi secara kebetulan.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	220,919	4	55,230	53,975	,000 ^b
Residual	117,673	115	1,023		
Total	338,592	119			

Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa nilai Fhitung adalah 53,975 dan signifikansinya adalah 0,000. Artinya, nilai Fhitung 53,975 lebih besar dari Ftabel 2,45. Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan politik anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan kata lain, semua faktor-faktor ini bekerja bersama-sama untuk memengaruhi penyerapan anggaran secara positif. Jadi, semakin baik perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan politik anggaran, semakin tinggi juga penyerapan anggaran yang terjadi.

3.1.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel yang kita pelajari dapat dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan uji koefisien determinasi, kita dapat mengetahui seberapa kuat, hubungan antara variabel, dependen dengan variabel,

RESEARCH ARTICLE

independent. Semakin tinggi nilai R², semakin besar kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variasi variabel dependen

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,843 ^a	,711	,701	,915

Dari hasil uji koefisien determinasi, dapat, diketahui bahwa nilai, R Square-nya adalah 0,711. Artinya, sebanyak 71% dari pengaruh yang terjadi berasal dari variabel, perencanaan, anggaran, pelaksanaan, anggaran, kompetensi, sumber daya manusia, dan politik anggaran. Sementara 29% sisanya dipengaruhi oleh, faktor-faktor, lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa variabel-variabel yang disebutkan sebelumnya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil penelitian tersebut.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa, perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang. Hal ini berarti bahwa ketika anggaran direncanakan dengan baik, penggunaannya juga akan lebih efektif. Contohnya, jika sebuah kantor pemerintahan merencanakan anggarannya dengan teliti dan tepat, maka anggaran tersebut akan digunakan secara efisien untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,487 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,685, dan nilai signifikansinya sebesar 0,014. Ini artinya, variabel perencanaan anggaran memang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan anggaran. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan penganggaran yang baik sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif di Kota Palembang. Temuan ini didukung oleh penelitian Sari, (2022) yang menemukan bahwa aspek perencanaan yang belum matang pada saat penyajian anggaran dapat berdampak negatif terhadap kemajuan program kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya serap rumah tangga Hasil penelitian Mustafa, dkk (2022), Sutono, dkk. (2022), Ferdinand, dkk (2020) dan Sari, dkk (2019) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh, terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini juga mendukung pernyataan bahwa semakin baik dalam perencanaan anggaran maka, semakin baik pula anggaran dimanfaatkan. Dari hasil uji yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa variabel pelaksanaan anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran OPD di Kota Palembang. Nilai t-hitung pada variabel pelaksanaan anggaran sebesar 10,300 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,658 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan.

Penelitian menunjukkan pengelolaan dana di Kota Palembang berpengaruh pada penggunaan dana oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD yang mengelola dana dengan baik, akan digunakan efektif. Sebaliknya, pengelolaan dana yang tidak efisien, dana mungkin tidak dimanfaatkan baik. OPD mengalokasikan dana untuk program penting dan efektif, maka dana digunakan dengan baik bagi masyarakat. Namun, jika dana tidak dikelola baik, program mungkin tidak terlaksana. Penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan dana efisien meningkatkan pemanfaatan dana publik di Kota Palembang. Pelaksanaan anggaran di OPD Kota Palembang ditingkatkan, penggunaan dana juga meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari perspektif teori pengembangan kapasitas, pemahamannya adalah semakin baik pelaksanaan anggaran maka semakin baik pula penyerapan anggarannya. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, menyelaraskannya dengan tujuan organisasi, serta meningkatkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab. Imelda, dkk (2022) menemukan adanya pengaruh penyerapan anggaran antar variabel pelaksanaan anggaran. Semakin baik pelaksanaan anggaran maka semakin baik pula pemanfaatan anggaran tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardayani dkk. (2022), Sutono dkk (2022) dan Handayani dkk (2022) menyatakan bahwa eksekusi anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

RESEARCH ARTICLE

Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa: "kompetensi SDM" yang berfluktuasi tidak berpengaruh terhadap, penyerapan anggaran OPD di Kota Palembang dan, tidak, signifikan. Nilai t-hitung variabel pelaksanaan, anggaran diketahui sebesar -6,619 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,658, dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ditemukan kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Oleh karena itu, ditemukan bahwa kapasitas pegawai tidak mempengaruhi penyerapan anggaran OPD Kota Palembang dan merupakan hal yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak serta merta mempengaruhi pemanfaatan anggaran. Hasil penelitian Ramadhani, *dkk* (2019) dan Imelda, *dkk* (2022) menunjukkan, bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini juga didukung oleh penelitian Arsyah (2017) bahwa kapasitas pegawai tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Beberapa faktor yaitu keyakinan, keterampilan, pengalaman, kepribadian pribadi, motivasi, masalah emosional dan kemampuan tidak mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia Budaya intelektual dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil, uji hipotesis yang dilakukan. peneliti diperoleh hasil bahwa variabel politik rumah tangga berpengaruh, positif dan signifikan. terhadap penyerapan anggaran di OPD Kota Palembang. Nilai t-hitung variabel anggaran politik sebesar 3,345 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,658 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (kurang dari 0) yang mengindikasikan terdapat pengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu terlihat bahwa politik anggaran mempunyai pengaruh yang positif, dan signifikan, terhadap penyerapan anggaran OPD di Kota Palembang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa politik anggaran mencerminkan keputusan tentang: apa yang akan atau tidak akan dilakukan pemerintah, jenis layanan yang harus diberikan, dan hak-hak apa yang dimiliki warga negara sebagai masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pelayanan publik, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi prioritas yang adil dan sesuai dengan, kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga berarti bahwa politik anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran sejalan dengan kepentingan: politik atau bahwa pelaksanaan yang direncanakan sejalan dengan prioritas yang disepakati bersama. Oleh karena itu, politik anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Imelda, *dkk* (2022) yang membuktikan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramadhani, *dkk* (2019) menemukan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap, penyerapan anggaran.

Keempat variable independen, dalam penelitian, ini yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan kebijakan anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran pada struktur kelembagaan daerah Kota Palembang. Karena hasil uji signifikansi gabungan atau uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (53,975 > 2,45), maka dapat diasumsikan bahwa hal ini mempunyai pengaruh yang jelas positif. Selain itu jika ditinjau dari tingkat signifikansi adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 5%. Variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran pada organisasi kelembagaan daerah Kota Palembang. Peningkatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan anggaran yang wajar dan maksimal akan meningkatkan penyerapan anggaran pada struktur kelembagaan di Kota Palembang. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,711, yang artinya variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 71% terhadap penyerapan anggaran di organisasi perangkat daerah: Kota Palembang. Sisanya, sebesar 29%, dipengaruhi oleh, faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam penelitian ini, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan politik anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ketika dilakukan dengan baik, anggaran akan lebih efektif diserap dan dimanfaatkan. Kompetensi pegawai tidak berpengaruh pada partisipasi dalam organisasi kelembagaan daerah Kota Palembang. Perencanaan anggaran, pelaksanaan

RESEARCH ARTICLE

anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan anggaran secara bersama-sama mempengaruhi penyerapan anggaran. Koefisien determinasi sebesar 0,711 atau 71,10% menunjukkan pengaruh tersebut. Pentingnya perencanaan, pelaksanaan, kebijakan anggaran yang baik, dan politik anggaran tepat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran di Kota Palembang. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, kuesioner yang disebarluaskan masih berupa hard file tidak menggunakan google form menjadikan proses pengambilan data menjadi lebih lama dan juga memerlukan biaya, waktu serta tenaga yang cukup banyak sehingga terdapat 8 buah kuesioner yang tidak kembali dan tidak dapat diolah karena penelitian yang terbatas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 71,10%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, dan juga menggunakan objek yang berbeda pula. Penggunaan variabel lain dan objek yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

5. Referensi

- Anfujatin, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 14(01). <https://doi.org/10.30996/dia.v14i01.1014>.
- Arniwita, A., Santoso, A., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2019). Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 166-170. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.77>.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117-134.
- Grindle, M. S. (1997). Getting good government: capacity building in the public sectors of developing countries. (No Title).
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Handayani, C. H., & Muda, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember*.
- Handayani, K. S., Sinarwati, N. K., & Rahmawati, P. I. (2022). The Effect of Budget Planning, Budget Implementation, and Human Resource Competencies on Budget Realization at Ganesha University of Education. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 438-445.
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1-10.

RESEARCH ARTICLE

HUBI, N. L. (2022). ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PU KOTA MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

Ilato, R. (2017). Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintahan, dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Lokal. Gorontalo: Ideas Publishing.

Imelda, I., Fachrudin, F., Satriawan, B., Wibisono, C., & Khaddafi, M. (2022). THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY, BUDGETING POLITICS AND PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES ON BUDGET ABSORPTION BY BUDGET IMPLEMENTATION AS A MODERATING VARIABLE IN THE GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology*, 1(12), 849-862.

Iqbal, M. (2018). Pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5(1), 747-764.

Mustafa, R. M., Azhar, N., Suyono, E., Rusmana, O., & Wahyudin, W. (2022). The Effect of Planning, Management Commitment, and Human Resources Competency on The Absorption of The Goods and Services Budget in The Local Government of Cilacap Region, Central Java. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 129-136. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6961>.

Oktaviani, I. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kppn Bandung I) (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).

Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>.

Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 78-91.

Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).

Sari, L. G. E., Yuesti, A., Sudja, I. N., & Kepramareni, P. (2019). Analysis of budget planning, competence of human resources and implementation of the VIII Lldikti region budget with organizational commitment as a moderation. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 10(02), 21273-21288.

Sartika, D., & Roza, S. J. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 7(1), 46-55. <https://doi.org/10.51510/jakp.v7i1.1668>.

Sirin, A., Indarto, I., & Saddewisasi, W. (2020). Determinan penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai moderating variable. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 147-163. <http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2690>.

RESEARCH ARTICLE

Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. *Bandung: Alfabeta*, 1-11.

Sutono, D. P. S., Respati, N. W., & Safrida, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat Di Daerah Lingkup Kemenlhk. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 135-144. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3656>.

SUWARNI, D. E., & MARUF, M. F. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Publika*, 6(5). <https://doi.org/10.26740/publika.v6n5.p%25p>.

Syahwildan, M., & Damayanti, I. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. *Ikraith-Ekonomika*, 5(1), 169-176.

Wardayani, K., Dewata, E., & Jauhari, H. (2022). Factors Affecting Budget Absorption Of Expenditure Local Apparatus Organization Prabumulih City Government During The Covid-19 Period. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1966-1978.

Wicaksono, T. K. (2021). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Dana Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).